

INTERESTS OF INDONESIA-THAILAND COOPERATION WITH BANK OF THAILAND ON INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Oleh : Merli Siahaan

E-mail: merli.siahaan0494@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Umi Oktyari R, MA

Bibliography: 16 journals, 12 books, 98 websites, 4 Official Documents

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia and Thailand have long relationship in investment and trade that can be developed. Financial stability and trust is required by both Indonesia and Thailand. To improve banking sector effectiveness measures can be done. This research explained reasons why Indonesia has cooperation with the Bank of Thailand (BoT) through Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

This qualitative research is document analysis using data from book, journals, newspapers and websites such as ojk.go.id and kemlu.go.id. Nation-state level analysis with liberalism perspectives about institutional political economy cooperation was used expose the interests of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in collaboration with Bank of Thailand (BoT).

The research showed this cooperation aims to strengthen the foundation of banking supervision in both counties based Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Bank of Thailand is committed to increasing the role and contribution of Thailand banks that already have operations in Indonesia with the principle of prudential supervision.

Keywords: bank, OJK, BoT, Investment, Indonesia, Thailand.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas mengenai “Kepentingan Indonesia Bekerja sama dengan Thailand melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Bank of Thailand* (BoT) 2018” Penelitian ini ditinjau dari kajian Ekonomi Politik Internasional, yang merupakan konsentrasi penulis.

Hubungan antara Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8, namun baru dimulai tahun 1950 hubungan diplomatik secara resmi. Sejak saat itu, kedua negara terus mengembangkan hubungan di berbagai bidang termasuk bidang politik dan ekonomi. di bidang ekonomi, Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan Indonesia adalah negara partner terbesar ke dua di Asia setelah Malaysia dan ke lima di dunia.¹ Thailand pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,59 persen. Seperti data yang di publikasikan CEIC data, ekonomi Thailand bertumbuh dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 3,90 persen.²

Indonesia dan Thailand telah lama menjalin kerja sama dalam

bidang investasi dan perdagangan, oleh sebab itu kerja sama pengawasan keuangan sangat penting bagi Indonesia maupun Thailand. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pondasi dari pengawasan perbankan di kedua negara berdasarkan Basel Core Principles for Effective Banking Supervision serta menjaga stabilitas keuangan yang aman.³

Bank Indonesia (BI) mencatat penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan di dalam wilayah salah satu negara dengan menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS) dengan Thailand sepanjang Januari hingga Februari 2019 telah mencapai THB 272 juta (setara Rp 121 miliar). Sejak diimplementasikan pada 11 Desember 2017, total transaksi perdagangan melalui LCS telah menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2018, total transaksi perdagangan melalui LCS mencapai rata-rata THB 130 juta atau setara Rp 58 miliar per bulan. implementasi LCS antara Indonesia dan Thailand

¹ Bambang Purwanto, ‘Indonesia-Thailand Nikmati Hubungan Harmonis Sejak Abad Ke-8’, *Www.Antaraneews.Com*, 2013 <<https://www.antaraneews.com/berita/362221/indonesia-thailand-nikmati-hubungan-harmonis-sejak-abad-ke-8>>. Akses 16 oktober 2019.

² Boby, ‘Ekonomi Indonesia Mentok Di 5,17 Persen, Gimana Dengan Negara-Negara Asean Ini’, 2019 <<https://www.moneysmart.id/ekonomi-negara-asia-tenggara/>>. Akses 16 oktober 2019.

³ willem Kurniawan, ‘Lembaga Perbankan Telah Menunjukkan Perkembangan Yang Pesat, Seiring Dengan Kemajuan Pembangunan Di Indonesia Dan Perkembangan Perekonomian Internasional Serta Sejalan Dengan Peningkatan Tuntutan Kebutuhan Masyarakat Akan Jasa Perbankan Yang Semakin Berag’, *Kontan.Co.Id*, 2018 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bank-of-thailand-perkuat-kerja-sama-pengawasan-perbankan>>[accessed 25 November 2019 pukul 06:58].

telah memberikan pasar dan berdampak positif bagi perdagangan bilateral Indonesia dan Thailand.⁴

Apabila sektor perbankan mengalami masalah, maka akan memberikan dampak buruk pada perekonomian suatu negara. Pemerintah Indonesia memberikan perhatiannya dengan membentuk suatu sistem pengawasan baru yang independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Keberadaan OJK, secara otomatis memisahkan fungsi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dimana secara konseptual Bank Indonesia akan bertanggung jawab mengawal sektor perbankan pada aspek makro (macro-prudential) sedangkan tanggung jawab pengawasan mikro (micro-prudential) ada di bawah kendali OJK.⁵

Kerangka Teori

Dalam melakukan sebuah penelitian, teori merupakan sebuah landasan atau gagasan

⁴ Yudo Winarto, 'BI: Transaksi Perdagangan Indonesia Dengan Thailand Capai Rp 121 Miliar', *Www.Kontan.Co.Id*, 2019 <<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-transaksi-perdagangan-indonesia-dengan-thailand-capai-rp-121-miliar>>. Akses 25 agustus 2019.

⁵ Reza Fazlur Rahman, 'Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan', *Private Law*, V.1 (2017), 7–15. Akses 25 agustus 2019.

atau kerangka berfikir yang memiliki penjelasan pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu Hubungan Internasional disyaratkan adanya suatu fenomena nasional maupun internasional dengan cara memungkinkan kita untuk mendapatkan identifikasi berbagai sebab dan efek yang berguna untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan terjadinya suatu fenomena. Beberapa pandangan mengenai mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lain, seperti pada dasarnya negara memilih antara kerjasama dan konflik. namun setiap negara memiliki asumsi yang berbeda seperti, realis memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Untuk hubungan bilateral mewakili bentuk hubungan terlebih lagi, melukiskan cara kerja yang bahkan sederhana hubungan dua negara yang menyediakan landasan penting untuk memahami dunia politik internasional yang kompleks dimana pun keberadaannya.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kerja Sama Indonesia –Thailand dalam Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank of Thailand (BoT)

Sejarah OJK

⁶ Arthur A Stein, *Circumstance and Choice in International Relations*, ed. by Ithaca and London, cetak ulan (Los Angeles: Cornell University Press, 1990).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Fintech dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁷

▪ Sejarah BoT

Biro Perbankan Nasional Thailand memulai operasinya pada 13 Mei 1940. Upacara pembukaan resmi diadakan pada 24 Juni 1940, yang bertepatan dengan Hari Nasional. Hanya setelah lebih dari setahun operasi Biro ketika Teater Asia-Pasifik Perang Dunia Kedua meletus. Pasukan Jepang mendarat di pantai Thailand pada 8 Desember 1941. Jepang yang menyerang menuntut agar Pemerintah Thailand membentuk bank sentral yang terdiri dari penasihat dan kepala departemen Jepang. Tentu saja Pemerintah Thailand tidak dapat menerima persyaratan seperti itu dan meminta agar Pangeran Viwat membuat rancangan undang-undang untuk mengubah status Biro Perbankan Nasional Thailand menjadi bank sentral, dengan segera. Karenanya "Undang-Undang Bank Thailand" diundangkan pada 16 April 1942. Upacara pelantikan

diadakan pada 10 Desember 1942, yang merupakan Hari Konstitusi. Bank Thailand dipindahkan ke tempatnya saat ini di halaman Istana Bangkhunprom pada tanggal 3 Maret 1945. Gedung kantor pusat yang baru didirikan pada tanggal 12 Juli 1982, dan pada tahun 2007, kantor pusat dipindahkan ke gedung baru yang dibangun antara Bangkhunprom.⁸

Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Kerangka Basel 2.5 Dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas Consultative Paper (CP) Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan CP mengenai Sekuritisasi pada Januari 2016. tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang disempurnakan dengan POJK Nomor 34/ POJK.03/2016

⁷ AuFi Ramadhania Pasha, 'Mengenal OJK: Sejarah, Fungsi Dan Kebijakan Strategi Terkini', *Cermati.Com*, 2019
<<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini>>.

⁸ www.bot.or.th, 'History of the Bank of Thailand ', *Www.Bot.or.Th*, 2019
<<https://www.bot.or.th/English/AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/History.aspx>>.

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.⁹

Tahapan kerjasama OJK dan BoT

Fungsi diplomasi dalam pandangan elme plischke adalah perwakilan (representation), melaporkan (reporting), komunikasi (communicating), negosiasi (negotiating), manevuver (maneuvering), disamping peduli pada kepentingan nasional di luar negeri. Ekonomi politik internasional merupakan instrument kompetisi dan konflik antar Negara sekaligus sebagai instrument kompetisi dan konflik antar Negara sekaligus sebagai instrumen kerja sama dan integrasi. Dalam evel internasional, ekonomi dan politik sulit untuk dipisahkan. Dalam kerjasama ini tidak terlepas dari negosiasi, negosiasi adalah suatu proses dimana usulan-usulan yang ekplisit dimajukan dengan berbagai alasannya demi tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang suatu pertukaran atau tentang kesadaran atau kepentingan bersama.¹⁰

OJK dan (BOT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengawasan perbankan untuk memperkuat pondasi dari pengawasan perbankan di kedua negara berdasarkan *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Bank of Thailand

⁹ ojk.go.id, 'No Title', *Booklet Perbankan Indonesia 2018*.

¹⁰ ambarwati. (Hal. 139-148)

Veerathai Santiprabhob dilakukan pada 12 oktober 2018 lalu, di sela-sela rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang diadakan di Bali.¹¹

Implementasi sistem perbankan di Indonesia-Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank of Thailand, di Bangkok, Thailand menandatangani surat dalam maksud (letter of intent) kesepakatan bilateral antara kedua pihak sebagai penerapan Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF), pada 31 maret 2016 lalu.¹² Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Hadad mengatakan, kerja sama ini selain untuk membuka jalan bagi industri jasa keuangan Indonesia mengembangkan bisnisnya di Thailand, juga dapat meningkatkan hubungan perdagangan antar kedua pihak. Potensi bisnis di Thailand sangat besar karena Indonesia adalah mitra dagang nomor tiga Thailand. indonesia mendukung pelaku industri keuangan Indonesia untuk mengembangkan bisnis ke Thailand untuk mendukung perdagangan antara Indonesia dan Thailand, Penandatanganan "Letter of Intent/LOI" itu dilakukan oleh Muliaman dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob. OJK mendukung upaya industri perbankan untuk mengembangkan usaha ke Thailand melalui

¹¹ ojk.go.id, 'OJK-BOT Perkuat Kerja Sama Pengawasan Perbankan', *Www.Ojk.Go.Id*. Di akses pada 22 januari 2020 pukul 06:27.

¹² tirto.id, 'OJK Sepakati Kerja Sama Bisnis Bilateral Dengan Thailand', *Tirto.Id*, 2016.

penyusunan persetujuan bilateral (Bilateral Agreement).

Prinsip-prinsip Program lembaga pengawasan keuangan

Prinsip-prinsip program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia mencakup: (1) Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK; (2) Prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pembiayaan terutama pada sektor pertanian (termasuk pertanian, peternakan dan maritim), infrastruktur, industri, energi dan UMKM; (3) Prinsip tata kelola lingkungan dan sosial dan pelaporan dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan nasabah-nasabah LJK; dan (4) Prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas SDM, TI, dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategi roadmap OJK.

Efektivitas Kinerja Indonesia-Thailand di Bidang Keuangan

Dari total perdagangan bilateral pada tahun 2016 yang mencapai 14 juta US Dollar, angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 15 juta US Dollar. Hal ini memperlihatkan

bahwa Indonesia serius dengan upaya peningkatan nilai perdagangan kedua negara. Oleh karena itu harapannya kemudahan investasi dan ekspor antar dua negara agar semakin ditingkatkan dengan melibatkan pelaku bisnis kedua Negara ini. Dikatakannya, serta dapat meningkatkan hubungan *people to people contact* antara kedua negara. diharapkan dari pertemuan yang dilakukan tersebut dapat mengurai tantangan-tantangan yang ada, terkait kerjasama bilateral Indonesia – Thailand, serta untuk memperkuat koordinasi antar kedua negara dan saling memberikan manfaat bagi masyarakat kedua Negara.

SIMPULAN

Lembaga perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu negara. Tidak ada suatu negara modern yang iklim perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang pesat tanpa peran lembaga perbankan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatiannya dengan membentuk suatu sistem pengawasan baru yang independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Keberadaan OJK secara otomatis memisahkan fungsi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dimana secara konseptual, Bank Indonesia akan bertanggung jawab mengawal sektor perbankan pada aspek makro (macro-prudential) sedangkan tanggung jawab pengawasan mikro

(micro-prudential) ada di bawah kendali OJK.

Kerjasama internasional atau international cooperations memiliki tujuan utama, yakni untuk memenuhi kepentingan nasional akan kebutuhan-kebutuhan terhadap potensi yang tidak dimiliki di dalam negeri. Hubungan antara Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8, namun hubungan diplomatik secara resmi baru dimulai tahun 1950. Sejak saat itu, kedua negara terus mengembangkan hubungan di berbagai bidang termasuk bidang politik dan ekonomi. Untuk bidang ekonomi, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan Indonesia adalah negara partner terbesar ke dua di Asia setelah Malaysia dan ke lima di dunia. Pada Oktober 2018 lalu Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bank of Thailand (BoT) telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) di tengah-tengah pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali. MoU yang ditandatangani tentang pengawasan perbankan, perjanjian kerjasama ini menjadi dasar bagi kedua otoritas dalam pengawasan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Basel yang efektif. Pihak Thailand memaparkan kehadiran perbankan Thailand di Indonesia sejak 1968 ketika bank pertama kali mendirikan kantor cabang asing yang berfokus pada perbankan korporasi di Indonesia. Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ada, Apakah, 'Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia', 2014,

414-24 <jurnal.unej.ac.id > index.php>

Ambarwati, Subarno Wijadma, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, pertama (Malang: Intrans Publishing, 2016)

Ardan Adhi Chandra, 'Kembangkan Sektor Jasa Keuangan, OJK Kerja Sama Dengan Bank Thailand', *Www.Detik.Com*, 2016

<<https://finance.detik.com/monev/d-3176704/kembangkan-sektor-jasa-keuangan-ojk-kerja-sama-dengan-bank-thailand>>

Arif Budianto, 'No Title', *Sindonews.Com*

<<https://jabar.sindonews.com/read/11105/1/standardisasi-sistem-keamanan-ti-untuk-jasa-keuangan-ramah-konsumen-1570612223>> [accessed 8 January 2020]

Aufi Ramadhania Pasha, 'Mengenal OJK: Sejarah, Fungsi Dan Kebijakan Strategi Terkini', *Cermati.Com*, 2019

<<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini>>

Baihaqi, Bari, 'OJK – Bank of Thailand Jajaki Kerjasama', *Neraca.Co.Id*, 2016

<<http://www.neraca.co.id/article/67610/ojk-bank-of-thailand-jajaki-kerjasama>> [accessed 21 January 2020]

Boby, 'Ekonomi Indonesia Mentok Di 5,17 Persen, Gimana Dengan Negara-Negara Asean Ini', 2019

<<https://www.moneysmart.id/ekonomi-negara-asia-tenggara/>>

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 'Booklet Perbankan Indonesia'

- Fallis, A.G, 'Bank of Thailand', *ABOUT BANK OF THAILAND*, 53.9 (2013), 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Fitriya Fitriya, 'Pengertian Bank, Jenis, Dan Fungsinya Untuk Masyarakat', *Www.Cermati.Com*, 2018 <<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>> [accessed 7 November 2019]
- <http://askrida.com>, 'Pentingnya EPK OJK Dalam Melindungi Konsumen', *Http://Askrida.Com*, 2015 <<http://askrida.com/pentingnya-epk-ojk-dalam-melindungi-konsumen.html#.XieTntJLfIU>> [accessed 7 January 2020]
- James A. Caporaso, David P. Levine, *THEORIES OF POLITICAL ECONOMY*, 1st edn (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)
- Jasa, Otoritas, Keuangan Dalam, Melakukan Pengaturan, D A N Pengawasan, Perbankan D I Indonesia, and Yoshua Putra Perdana, 'No Title', 23, 2014, 1–13
- kanal.web.id, 'Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)', *Kanal.Web.Id*, 2016 <<https://www.kanal.web.id/pengertiankanal.web.id-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb>>
- Keuangan, Otoritas Jasa, Delegasi Ojk, Ketua Dewan, Komisioner Ojk, Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif, and others, 'BILATERAL MEETING OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK OF', 2019
- lps.go.id, 'Uu 21 Th 2011 Ttg Ojk', *Lps.Go.Id*, 2020
- Maghfira Nursyabila, 'No Title', *Okezone.Com*, 2019 <<https://economy.okezone.com/read/2019/08/31/320/2099039/ojk-blokir-177-fintech-ilegal-di-2019>> [accessed 19 January 2020]
- Monica Wareza, 'OJK Teken Perjanjian Tukar Informasi Dengan Bank of Thailand', *..Cnbcindonesia.Com*, 2018 <OJK Teken Perjanjian Tukar Informasi dengan Bank of Thailand> [accessed 7 January 2020]
- Murdani, Andika Drajat, 'Liberalisme Dalam Ekonomi Politik Internasional Ekonomi • Perguruan Tinggi Teori Liberalisme: Dari Sejarah Hingga Ide Pokok Dalam Ekonomi Politik', *Portal.Ilmu.Com*, 2018 <<https://portal-ilmu.com/teori-liberalisme-dalam-ekonomi-politik/>> [accessed 10 November 2019]
- Nursyabila, Maghfira, 'Transaksi Jasa Keuangan Digital Asean Ditaksir Tembus USD38 Miliar', *Okezone.Com*, 2019 <<https://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124051/transaksi-jasa-keuangan-digital-asean-ditaksir-tembus-usd38-miliar>> [accessed 7 January 2020]
- ojk.go.id, 'Joint Press Release: Signing of a MoU on Banking Supervision between OJK and Bank of Thailand', *Www.Ojk.Go.Id*, 2018 <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran->

- pers/Pages/Joint-Press-Release-Signing-of-a-MoU-on-Banking-Supervision-between-OJK-and-Bank-of-Thailand.aspx>
- , ‘OJK-BOT Perkuat Kerja Sama Pengawasan Perbankan’, *Www.Ojk.Go.Id*
- , ‘Sejarah Standar Basel’, *Www.Ojk.Go.Id*, 2017 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>>
- Parta Setiawan, ‘Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli’, *Www.Gurupendidikan.Co.Id* <<https://www.gurupendidikan.co.id/definisi-ekonomi-menurut-para-ahli/>>
- Perdana, ‘Journal Peer to Peer Lending’, *Journal Peer to Peer Lending*, 53.9 (2018), 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Purwanto, Bambang, ‘Indonesia-Thailand Nikmati Hubungan Harmonis Sejak Abad Ke-8’, *Www.Antaranews.Com*, 2013 <<https://www.antaranews.com/berita/362221/indonesia-thailand-nikmati-hubungan-harmonis-sejak-abad-ke-8>>
- Putri, Cantika Adinda, ‘Banyak Kasus Di Jasa Keuangan, OJK Perketat Pengawasan’, *Cnbcindonesia.Com*, 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123093502-17-132081/banyak-kasus-di-jasa-keuangan-ojk-perketat-pengawasan/2>> [accessed 11 February 2020]
- Rahman, Reza Fazlur, ‘Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan’, *Private Law*, V.1 (2017), 7–15
- Rudy, Teuku May, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL*, ed. by Agus Salim (bandung: NUANSA, 2007)
- Saleh, Tahir, ‘Digoyang Jiwasraya & Bumiputera, 2 Aturan Asuransi Dirilis’, *Cnbcindonesia.Com*, 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200127141527-17-133031/digoyang-jiwasraya-bumiputera-2-aturan-asuransi-dirilis>> [accessed 7 February 2020]
- Sitepu, P. Anthonius, *STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL*, pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Sorensen, Robert Jackson & Georg, *Introduction International Relations* (New York, 1999)
- Stein, Arthur A, *Circumstance and Choice in International Relations*, ed. by Ithaca and London, cetakan ulan (Los Angeles: Cornell University Press, 1990)
- tirto.id, ‘OJK Sepakati Kerja Sama Bisnis Bilateral Dengan Thailand’, *Tirto.Id*, 2016
- weboffice, ‘Struktur Dan Kinerja Perbankan Indonesia’, *Www.Feb.Ui.Ac.Id*, 2019 <<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/03/29/buddi-wibowo-struktur-dan-kinerja-perbankan-indonesia/>> [accessed 9 January 2020]
- Www.bi.go.id, and PD, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN’, 11.2 (2011),

10–14

<<https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>>

Www.bot.or.th, 'History of the Bank of Thailand ', *Www.Bot.or.Th*, 2019

<<https://www.bot.or.th/English/AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/History.aspx>>

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA
KEUANGAN', 11.2 (2011),
10–14

Booklet Perbankan Indonesia 2018

DOKUMEN

Booklet Perbankan Indonesia 2018

Booklet Perbankan Indonesia 2019